

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. (2002). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. Sage Publication
- Fuadi, F & Wardiyatno, B. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husein, Umar. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadjon, P.M. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Yogyakarta.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Richard M Steers (1985). *Managing Effective Organizations*. Kent Publishing
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti, G. G. (2004). *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Setyowati. (2013). *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suaib, M.R (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.

Jurnal :

- Adelina, L. (2016). Perencanaan Sistem Pendataan Dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14, 33–38.
- Afiyanti, Y. (2008). Jurnal Keperawatan : Lembar metodologi Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 137–141.
- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98.
- Ayu Tantri, R., & Mubaroq, H. (2022). Optimalisasi Good Governance dengan Program “SI JINGGO” dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(1), 33–39.
- Ayunda, R., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission Sebagai E- Government Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal of Judicial Review*, 71–84.
- Batubara, J. (2018). Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan

- dalam Konseling Juliana. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95–107.
- Cahyono, D. P. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Suatu Studi Tentang Silokdes di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(01), 56–61.
- Dailiati, S., & Sudaryanto, H. D. (2017). Prinsip - Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2), 1–8.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–9.
- Dwiyanto, D. (2022). Dasar Hukum Bagi E-Government Di Indonesia: Studi Pemetaan Hukum Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(8.5.2017).
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Otonomi*, 21(1996), 6.
- Eskandar. (2022). Efektivitas Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Anggaran di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 46–61.
- Fauzan, A., & Prasetyo, A. H. (2020). Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Kelurahan Desa Kreyo Pemalang. *Sainteks*, 16(2).
- Gojali, J. (2022). Implementasi Good Governance dalam Pengadaan Langsung Elektronik pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar DISDIKBUD Kabupaten Serang Good Governance Implementation in Direct E-Procurement on Elementary Education Development Division Education Department, Seran. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 22.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).
- Hasibuan, Z. (2015). Langkah-Langkah Strategis Dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk Pemda. *Jurnal Sistem Informasi Mti Ui*, 3(November), 1–5.
- Herawati, N. R. (2014). Penerapan E-Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *JIS*, 13(2), 63–76.
- Karlina, A. (2018). Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Kurniawan, R. (2010). Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Good Governance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(1), 25.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 119–126.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Maani, K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, VIII(1).

- Maghfiroh, N. A. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 5(1), 34–44.
- Majid, J. (2021). Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government Di Indonesia. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 186.
- Marsuq, & Fitriansyah, R. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sambutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 194–207.
- Muhajir, R., Nasrulhaq, N., & Tahir, N. (2022). Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 299–314.
- Muktiali, M. (2009). Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3(2), 11–20.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(April), 273–288.
- Nasrullah. (2018). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar). *JUSITI: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 6(2), 23–31.
- Nugraha, M. K. (2022). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *112*, 1–16.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 22(1), 1–17.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104.
- Nurchayani, D., & Daru, R. (2011). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. *Telematika*, 2008(26), 205–211.
- Nurisna, & Sahade. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52.
- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 238–246.
- Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1437.
- Parsaorantua, P. humisar, Pasoreh, Y., & Rondonuwu, sintje A. (2017). Implementasi teknologi informasi dan komunikasi. *UnikasiJurnal Acta Diurna Kom*, VI(3), 1–14.

- Pelu, A., Madubun, J., Wance, M., & Accountability, S. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science*, 2, 124–139.
- Purba, R. H., Widodo, S., & Ermanovida. (2023). Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 18–29.
- Rafiqi, I., Selviyanti, N. H., Istianah, Layyinah, Halimah, S., Muthmainnah, N. E., Dianawati, & Annisa, N. (2018). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 115–138.
- Retnowati, D., Aditiyawarman, & Nursetiawan, I. (2022). Efektivitas Pelayanan Berbasis Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar. *FISIP Universitas Galuh*, 2(1), 1756–1769.
- Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, 4, 1–15.
- Rahmatiah. (2017). Peranan Sekertaris Daerah Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 5(1), 27–33.
- Ridha, N. (2020). Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian. *Computer Graphics Forum*, 39(1), 672–673.
- A. Sabani, H. Deng, V. Thai. 2019. Evaluating the Performance of EGovernment in Indonesia: A Thematic Analysis. In Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2019), Melbourne, VIC, Australia, April 3-5, 2019, 6 pages. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326422>
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali Hasbi. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 176–191.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 12.
- Santrio, K., & Fatimah, S. (2005). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Good Governance*, 3, 222–228.
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194–211.
- Sari, M. P. (2015). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(2), 549–563.
- Sasundame, R. G., Tulusan, F., & Kalangi, J. (2018). Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Pembuatan Ektp Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *G. Jurnal Administrasi Unsrat*, 1–18.
- Sawir, M., & Si, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Universitas Yapis Papua*, 9–18.

- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. *JUPITER : Jurnal Penerapan Ilmu-Ilmu Komputer*, 1(1), 10–16.
- Sudianing, Ni Ketut; Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Suharti, & Tresiana, R. (2015). Analisis Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2012-2016. *Costing*, 1(April), 49–58.
- Sulfiani, A. N. (2018). Efektivitas Pelaporan Monitoring & Evaluasi Program Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 1(1), 8–15.
- Sulfiani, A. N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908.
- Sumatri, Z. B. P. (2018). Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 07(1), 1–15.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Wahyuni, S. (2022). Strategi Implementasi Smart Governance Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Program Rindu Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). *Material Safety Data Sheet*, 33(1), 1–12.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability In The Management Of The Village Fund Allocation In Villages At Rogojampi District , Banyuwangi Regency). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi . IV*(2), 148–152.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- Wijaya, S. W., & Surendro, K. (2006). Kajian Teoritis: Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Dan Keberhasilan E-Government. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006)*, 2006(Snati), 25–28.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16.
- Yohana, N., Tantri, D., & Yazid, P. (2014). Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 5(2), 153–168.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13.
- Yusriadi, Murdyastuti, A., & Purwowibowo. (2022). Governance Of Child Social

Welfare Institutions Based On The Principle Of Good Governance : Study at LKSD Al-Aziiz , Jember Regency. *Rdjpbs*, 2(1), 52–64.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Skripsi dan Thesis :

- Malela, M. A. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penerapan Prinsip Good Governance (Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Universitas Islam 45 Bekasi.
- Maulidin, M. D. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Aplikasi E-Monev Pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Periode 2017 (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro). Univeristas Brawijaya.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Sistem Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan berbasis web pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. ISB ATMA LUHUR.
- Qurbani, M. (2022). Efektifitas Penggunaan Sistem E-Planning Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Pemerintah Kab Kepulauan Meranti. Universitas Islam Riau.

Produk Hukum :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiata/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Sistem Pelaporan Pembangunan.
- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900/Kep.434-Bang/I/2023 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuran/Pembobotan Progres Fisik Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2023.
- Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2023.

Situs web :

Situs web resmi UN E-Government Knowledgebase, Diakses pada 03 Agustus 2024 dari <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>

Situs web resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Diakses pada 04 Agustus 2024 dari <https://setkab.go.id/presiden-buka-spbe-summit-2024-dan-luncurkan-govtech-indonesia/>